

DEMOKRASI INDONESIA

Oleh Nurcholish Madjid

Sudah tentu mengatakan begitu saja bahwa demokrasi seperti yang dipraktikkan di negeri-negeri Barat, biasa disebut secara singkat “Demokrasi Barat”, tidak cocok untuk negara kita adalah bersifat agak stereotip. Sebab pernyataan itu sudah lama menjadi bagian dari pikiran kita tentang sistem politik yang dinyatakan berulang-ulang, dan dahulu merupakan bagian yang amat penting dalam rangka indoktrinasi politik Orde Lama. “Dalil” itu tidaklah muncul begitu saja, tetapi merupakan penyimpulan dari pengalaman-pengalaman empiris yang mahal dalam sejarah pertumbuhan republik kita, khususnya di masa berlakunya UUD Sementara.

Di zaman Orde Baru ini, tampak seperti ada keengganan untuk memegang stereotip itu secara serius, disebabkan masih tertinggalnya kesan yang cukup mendalam bahwa ia dulu disalahgunakan oleh rezim Orde Lama untuk melapangkan jalan bagi pelaksanaan pikiran Bung Karno sendiri tentang suatu sistem politik, yang akhirnya tentu saja berujung pada sesuatu yang menyerupai kediktatoran.

Lepas dari konotasi negatif sebagai akibat perjalanan sejarah bangsa yang tak mungkin dihindari itu, perenungan lebih lanjut tentang suatu sistem politik, jika kita cukup bebas dari bias-bias ataupun keinginan-keinginan yang tertanam, akan menyampaikan kita kepada kesimpulan bahwa memang tidak terdapat suatu sistem yang begitu rupa berlaku untuk setiap zaman dan tempat, sehingga dapat merupakan *ideal type*. Jika kita perhatikan, maka

pertama-tama perkataan “demokrasi” itu sendiri merupakan jargon politik yang diperebutkan antara negara-negara Barat (Kapitalis) dan Timur (Komunis), lengkap dengan argumentasi-argumentasi yang memperkuat pendapat diri sendiri serta tuduhan kepada pihak lawannya sebagai bukan demokrasi. Di dalam lingkungan masing-masing pun terjadi interpretasi dan pelaksanaan mendetil yang berbeda. Beberapa negara di Barat menganut sistem monarki konstitusional dan kabinetnya yang parlementer, dipimpin seorang perdana menteri. Sebagian lagi menggunakan cara yang sama, tetapi kepala negara bukannya seorang raja melainkan presiden. Ada lagi yang secara gampang dinamakan “sistem Prancis” yang mempunyai pemerintahan dengan seorang perdana menteri yang tidak begitu memegang peranan. Dan sudah tentu setiap orang mengetahui sistem presidentilnya Amerika Serikat. Sama halnya di negara-negara Timur (Komunis), juga terdapat perbedaan-perbedaan dalam interpretasi sekunder tentang sistem demokrasi rakyat yang mereka anut.

Jika tidak terdapat suatu *ideal type* sistem politik yang universal, maka setiap bangsa sudah selayaknya menemukan sendiri sistem yang cocok untuk kondisi masyarakatnya. Suatu sistem baru berarti jika ia dapat dilaksanakan dengan cukup lancar. Hal itu berarti ia harus memperoleh topangan sosial-kultural secukupnya. Ungkapan bahwa kita harus mengenal kepribadian nasional — ini pun mempunyai konotasi stereotip — menunjukkan adanya kesadaran akan hal tersebut tadi. Topangan sosial-kultural bagi suatu sistem akar membuatnya dapat dimengerti oleh rakyat.

Tetapi justru di sinilah kesulitannya. Tidak perlu merupakan dilema yang memaksa kita memilih salah satu dan meninggalkan yang lain dengan keuntungan dan kerugian yang sama. Tetapi kesulitan itu ialah dalam memilih unsur-unsur mana dari nilai-nilai sosial-kultural bangsa kita yang dapat mendukung proses kemajuan sehingga harus dikembangkan, dan unsur-unsur mana pula yang bersifat sebaliknya sehingga harus ditinggalkan. Bahkan sampai sekarang pun masih merupakan problem, mana unsur budaya di

Indonesia ini yang betul-betul bernilai nasional dan bukan hanya lokal, daerah atau suku? Sementara kita secara konkret mengetahui segi kebhinnekaan budaya kita, tantangan untuk menemukan segi ketunggalan budaya itu — harus diakui — masih dalam proses perkembangannya.

Maka kesadaran akan tidak adanya suatu sistem politik yang secara universal merupakan *ideal type* tadi memaksa kita berusaha memahami benar-benar keadaan bangsa dan tanah air sendiri, serta mengenali kebutuhan-kebutuhan mendesak rakyatnya dalam mewujudkan kualitas hidup yang manusiawi. Dan setiap kesimpulan tentang suatu sistem yang harus dijalankan sesuai dengan perkembangan itu tidak dibenarkan untuk diberi harga mati, sekali dipilih kemudian tidak ada lagi tawar-menawar dengan kesadaran baru. Sebab setiap percobaan untuk merumuskan suatu sistem “sekali untuk selamanya” (*once for all*) pasti akan menemui kegagalan karena ia akan membelenggu diri sendiri dan membeku. Maka di sini kita dituntut untuk senantiasa berpikir kreatif dan baru.

Dalam semangat berpikir inilah kita harus menilai kejadian-kejadian yang sekarang ini mendominir suasana politik tanah air kita. Tentu banyak kejanggalan-kejanggalan dalam forum tertinggi itu, khususnya yang menyangkut cara-cara pengambilan keputusan. Tetapi mengingat proses yang mesti kita alami dalam usaha menemukan sistem politik yang benar-benar Indonesia, kita berharap peristiwa yang kini sedang berjalan itu akan memperkaya pengalaman kita selama ini. [❖]